

Dashboard analytics - Vuexy - Bootstrap HTML admin template

No. Temuan	Judul	Rekomendasi	Saldo	Kesimpulan BPK	Tindak Lanjut	Keterangan	Jumlah Saldo
26	Kelebihan Pembayaran Remunerasi Pegawai PPKGBK Sebesar Rp22,50 Juta.	BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara menginstruksikan Direktur Utama PPKGBK untuk: a. Direktur Keuangan selaku PPK, Kepala Divisi Umum dan Kepegawaian, Kepala Divisi Anggaran dan Administrasi keuangan, dan Bendahara Pengeluaran pada PPKGBK kura	0	Semester I Tahun 2020: Belum ada dokumen instruksi kepada Direktur Keuangan selaku PPK, Kepala Divisi UMP, Kepala Divisi Angkeu, dan Bendahara Pengeluaran sesuai rekomendasi yang dimaksud. (sudah diajukan SMT I 2020 tapi belum hilang, diajukan kembali smt II 2020)	SURAT TEGURAN DIRUT		0
14	Piutang usaha yang disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2008 sebesar Rp16.809,94 juta pada PPKGBK belum sesuai ketentuan.	Menagih piutang sebesar Rp16.809.936.052,50 kepada para pemakai jasa/mitra/ pelanggan telah melampaui batas waktu yang telah disepakati dan ditetapkan.	4434686053	Semester I Tahun 2014: telah diajukan surat pelimpahan piutang ke PUPN. Semester I Tahun 2020: Belum sesuai	sudah diajukan ke KPKNL	tanya ke pak dudi, mbak anis, pak edi terkait surat dari PUPN	6517186053
21	Perjanjian dan pengalihan hak atas Proyek Play Ground dan Restoran Taman Ria Senayan tidak diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara yang berasal dari royalti serta denda keterlambatan sebesar Rp2.082,50 juta belum dipungut.	b. Menginstruksikan kepada Direktur Utama BLU PPKGBK untuk menagih pembayaran royalti tahun 2004 dan Juni 2008 masing-masing sebesar Rp.700.000.000,00 dan Rp350.000.000,00 serta denda keterlambatan sebesar Rp.1.032.500.000,00	2082500000	Semester I Tahun 2020: PT ALP sudah membayar Royalti Tahun 2004 sebesar Rp700jt dan Tahun 2008 Rp350jt sesuai temuan BPK denda yang harus dikenakan sebesar Rp1.032.500.000 namun menurut PPKGBK sebesar Rp206.500.000 sehingga terdapat selisih perhitungan sebesar Rp826.000.000. Bukti Rekening Koran atas			6517186053

No. Temuan	Judul	Rekomendasi	Saldo	Kesimpulan BPK	Tindak Lanjut	Keterangan	Jumlah Saldo
				penerimaan pembayaran royalti dan denda keterlambatan belum disampaikan pada tim BPK.			
4	Pembayaran Honorarium Narasumber Tidak Sepenuhnya Mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2016	BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: c. Dirkeu PPKGBK selaku KPA yang tidak cermat dalam menetapkan harga satuan honorarium Konsultan dan Tim Pelaksana Kegiatan tidak mengacu pada SBM Tahun 2016		Semester I Tahun 2017 : Belum Sesuai rekomendasi (sudah diajukan SMT I 2020 namun belum ada progres. konfirmasi ke mbak anis surat teguran dari mensesneg utk dirkeu)	Surat Teguran	Surat Teguran	0